ANALISIS PENENTUAN PRIORITAS PENGEMBANGAN SEKTOR PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO

Heru Irianto
Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian / Agrobisnis
Fakultas Pertanian UNS

ABSTRACT

The reseacrh aims to determine priority economic sector to develop at Sukoharjo Regency. Based method used in research is descriptive with using time series data for 1998 to 2002 about economic sector on GRDP (Gross of Regional Domestic Product) of Sukoharjo Regency. Analysis method use combination Location Quotient (LQ) and Shift Share (SS) Model. Its result, the first sector to develop are Contruction, and the second sector are Mining and quaning, Electricty, Gas and Water Suply sector , Trade, hotel and restoran sector, Transport and Communication sector, Agriculture sector and Services sector. Finally sector to develop are Manufacturing industry and Financial, Ownership and Business Services sector.

Key words : prirority, LQ, SS, Sukoharjo regency.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional di Indonesia. Usaha ini terus dilakukan agar terjadi keserasian baik di tingkat desa dengan kota, maupun di satu daerah dengan daerah lain. Untuk itu perlu disusun konsep pembangunan dan pemberdayaan, yang diharapkan dapat menciptakan keserasian pembangunan di tiap daerah dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing. Di samping itu juga terus diupayakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan serta mempercepat peningkatan kemampuan daerah tertentu yang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan untuk berkembang.

Selain itu, perlu juga upaya agar setiap daerah kabupaten memiliki keunggulan tertentu yang berbeda dengan kabupaten yang lain. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah menentukan sektor apa pada daerah kabupaten ini yang menjadi sektor basis (unggulan) dibandingkan dengan daerah kabupaten yang lain.

Adanya pemberdayaan potensi setiap daerah kabupaten mengenai sektor perekonomian mana yang perlu dikembangkan, akan memberikan karakteristik perekonomian setiap daerah menjadi berbeda-beda. Kondisi ini akan memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menentukan sektor perekonomian mana yang perlu diunggulkan dengan pertimbangan keunggulan komparatif dengan daerah lain. Dengan demikian antara daerah satu dengan daerah lain akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan serta saling membutuhkan, tidak ada lagi suatu daerah mendominasi/ menguasai daerah lain. Disamping itu suatu daerah akan bisa menghemat anggarannya.

Pemerintah dengan anggaran pembangunan dan kebijakan investasi yang ditetapkannya berperan besar terhadap pemerataan pembangunan antar daerah. Anggaran pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai sarana dan prasarana ekonomi di daerah-daerah yang nantinya diharapkan dapat mendorong masuknya investasi swasta di daerah tersebut. Pola alokasi investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pola alokasi investasi yang tidak seimbang, mengakibatkan kegiatan ekonomi yang tidak seimbang pula. Selain itu sektor-

sektor ekonomi yang memiliki potensi di daerah-daerah perlu dikembangkan dengan investasi sehingga dapat lebih berperan terhadap kemajuan perekonomian di daerah.

Disamping pengaruh investasi tersebut perlu juga dilihat faktor lain yang mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian di suatu daerah. Pengaruh yang ditimbulkan itu akan berbeda-beda tergantung kepada agen-agen pertumbuhan yang ada di daerah bersangkutan. Agen-agen tersebut merupakan jumlah kapasitas yang terdapat didalam masyarakat di daerah bersangkutan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan. Kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan ini akan menghasilkan munculnya kewiraswastaan, peningkatan sumber pengetahuan, pengembangan keterampilan produktif masyarakat dan peningkatan laju tabungan dan investasi.

Perumusan Masalah

Seiring dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten perlu disusun distribusi pendanaan terhadap masing-masing sektor perekonomian yang ada dan mengetahui sektor mana yang perlu dikembangkan dan yang mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah Sukoharjo. Untuk itu perlu dilakukan kajian sebagai upaya untuk mengetahui potensi perekonomian yang dapat dikembangkan di kabupaten bersangkutan yang sesuai dengan prioritas anggaran yang ada. Sehingga dalam penetapan anggaran pembangunan yang dilakukan pada berbagai sektor perekonomian itu sesuai dengan prioritas pengembangan sektor perekonomian dengan tepat guna dan tepat sasaran. Disamping itu dengan terbentuknya model pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan dapat diketahui ataupun bisa memprediksi sektor perekonomian mana yang bisa diupayakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan Penelitian

1. Menentukan sektor-sektor perekonomian yang dominan mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah Kabuapten Sukoharjo,
2. Menentukan prioritas pengembangan sektor perekonomian dan efektivitas porsi jenis belanja dalam laju pertumbuhan ekonomi

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan adalah diskriptiv dengan menggunakan dasar pembagian sekctor pertumbuhan PDRB menurut BPS dengan data time series tahun 1988 sampai dengan 2002.

Analisis LQ digunakan untuk melihat kemampuan Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan sektor perekonomian.

Rumus yang digunakan adalah

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

dimana :

LQ : Indeks Location Quotion

vi : Pendapatan/tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah

vt : Pendapatan/tenaga kerja total pada tingkat wilayah

Vi : Pendapatan/tenaga kerja sektor i pada tingkat nasional

Vt : Pendapatan/tenaga kerja total nasional

Kriteria :

LQ > 1 maka dapat dikatakan bahwa sektor i di daerah tersebut sebagai sektor basis.

LQ < 1, sektor i bukan sebagai sektor basis (sektor non basis).

Analisis *Shift Share* (SSA) ini digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu daerah meliputi pula proses pertumbuhan sektor-sektor dan pergeserannya di Kabupaten Sukoharjo. Rumus yang digunakan sebagi berikut :

(Yij = PNij + PPij + PPWij atau
Y'ij – Yij = Yij (Ra – 1) + Yij (Ri –Ra) + Yij (ri – Ri)

dimana :

Yij = perubahan dalam tenaga

kerja/produksi sektor i pada wilayah Kabupaten Sukoharjo

PNij = Pertumbuhan Nasional tenaga kerja/ produksi sektor i pada wilayah Kabupaten Sukoharjo

PPij = Pertumbuhan Proporsional tenaga kerja/produksi sektor i pada wilayah Kabupaten Sukoharjo

PPWij = Pertumbuhan Pangsa Wilayah tenaga kerja/produksi sektor i pada wilayah Kabupaten Sukoharjo

Y'ij = produksi/tenaga kerja dari sektor i wilayah Kabupaten Sukoharjo pada tahun ahkir analisis

Yij = produksi/tenaga kerja sektor i wilayah j pada tahun dasar analisis

(Ra-1) = Persentase perubahan PDRB/ tenaga kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan nasional

(Ri-Ra)= Persentase perubahan PDRB/tenaga kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional

(ri-Ri) = Persentase perubahan PDRB/tenaga kerja yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah

ri = Y'ij / Yij

Ri = Y'i. / Yi.

Ra = Y'.. / Y..

Y'i. = PDB/tenaga kerja (nasional) sektor i pada tahun akhir analisis

Yi. = PDB/tenaga kerja (nasional) sektor i pada tahun dasar analisis

Y'.. = PDB/tenaga kerja (nasional) pada tahun akhir analisis

Y.. = PDB/tenaga kerja (nasional) pada tahun dasar analisis

Kriteria :

PPij < 0, menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah Kabupaten Sukoharjo pertumbuhannya lambat.

PPij ≥ 0, menunjukkan bahwa sektor i pada wilayah j pertumbuhannya cepat.

PPWij ≥ 0, berarti sektor i wilayah Kabupaaten Sukoharjo mempunyai daya saing yang baik apabila dibandingkan dengan wilayah lain untuk sektor yang sama. Atau dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut mempunyai comparative advantage untuk sektor i bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

PPWij < 0, berarti sektor i wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak dapat bersaing dengan baik apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Kemudian dilakukan analisis gabungan LQ dan SS untuk menentukan skala prioritas dalam pengembangan sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Cara penilaiannya adalah dengan memberikan tolak ukur dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Gabungan nilai LQ dan *Shift Share*

Prioritas Pengembangan	LQ	PP	PPW
Utama	≥ 1	+	+
Kedua	≥ 1	-	+
	≥ 1	+	-
	< 1	+	+
Ketiga	< 1	-	+
Keempat	< 1	+	-
Kelima	< 1	-	-
Alternatif	≥ 1	-	-

Sumber : Setyani *et al* (2002)

Keterangan :

LQ ≥ 1 : sektor/sub sektor yang merupakan sektor basis

LQ < 1 : sektor/sub sektor yang merupakan sektor non basis

PP + : pertumbuhan sektor/sub sektor termasuk cepat
PP - : pertumbuhan sektor/sub sektor termasuk lambat
PPW + : sektor/sub sektor mempunyai daya saing yang baik
PPW - : sektor/sub sektor mempunyai daya saing yang baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Sektor perekonomian di wilayah Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 9 sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan sektor terakhir adalah sektor jasa-jasa dan pemerintahan. Untuk mengetahui sektor-sektor basis dan bukan basis dilakukan dengan analisis LQ. Berikut ini hasil perhitungan LQ sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo selama masa analisis sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis LQ Sektor Perekonomian di Kabupaten Sukoharjo Tahun 1998 - 2002

Sektor perekonomian	1998	1999	2000	2001	2002	rata2
Pertanian	1,31	1,39	1,36	1,33	1,30	1,34
Pertambangan&penggalian	0,82	0,82	0,83	0,77	0,76	0,80
Industri pengolahan	0,89	0,86	0,87	0,87	0,89	0,88
Listrik, gas dan air bersih	0,84	0,81	0,98	1,05	1,06	0,95
Bangunan	1,10	1,09	1,16	1,20	1,23	1,16
Prdagangn, hotel&restoran	0,86	0,84	0,81	0,83	0,84	0,84
Pengangkutan & komunks	0,95	0,94	1,01	1,03	1,04	0,99
Keuang,sewa&jsa perush	0,91	0,95	1.00	1,01	1,01	0,98
Jasa-jasa	1,04	1,04	1,06	1,05	1,04	1,05

Sumber : Diadopsi dan diolah dari data PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 1998-2002

Berdasarkan tabel 2 tersebut terlihat bahwa di Kabupaten Sukoharjo ada 3 sektor perekonomian yang mempunyai nilai LQ lebih dari satu yaitu sektor pertanian (1,34), sektor bangunan (1,16) dan sektor jasa-jasa (1,05). Dari hasil analisis, ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis atau sektor yang diunggulkan di Kabupaten Sukoharjo untuk saat ini. Besaran nilai LQ tersebut memberikan makna bahwa untuk sektor pertanian disamping bisa memenuhi pasar lokal (untuk kebutuhan masyarakat Sukoharjo), juga masih ada kemampuan ataupun peluang untuk bisa memasarkan output pertanian ke luar wilayah Sukoharjo baik antar daerah maupun ke luar negeri yaitu sebesar 0.34 persen. Untuk sektor bangunan terutama perumahan Kabupaten Sukoharjo disamping mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, juga dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat diluar Sukoharjo sebesar sekitar 0.16 persen. Begitu juga untuk sektor jasa-jasa juga mampu melayani masyarakat di luar Sukoharjo yaitu sebesar sekitar0.05 persen.

Sedangkan enam sektor yang lain mempunyai nilai LQ yang kurang dari satu, yaitu 0,8 untuk sektor pertambangan dan pengalian, 0,88 untuk sektor industri pengolahan, 0,95 untuk sektor listrik, gas dan air

bersih, 0,84 untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, 0,99 untuk sektor pengangkutan dan komunikasi, dan 0,98 untuk sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keenam sektor perekonomian tersebut termasuk sektor non basis di Kabupaten Sukoharjo.

Lebih lanjut ke tiga sektor basis tersebut menunjukkan bahwa 3 sektor tersebut merupakan sektor perekonomian yang mampu memenuhi kebutuhan di dalam Kabupaten Sukoharjo bahkan mampu memasok kebutuhan luar Kabupaten Sukoharjo.

Selama periode tahun 1998-2002, sektor pertanian selalu mempunyai nilai LQ lebih tinggi dari satu yang berarti selama periode tersebut pertanian selalu menjadi sektor basis. Hal ini berarti bahwa selama kurun waktu tersebut, sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan mampu memenuhi permintaan daerah lain atau mampu mengekspor ke daerah lain di luar Kabupaten Sukoharjo. Sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan PDRB Kabupaten Sukoharjo, sektor ini pada tahun 2002 memberikan sumbangan sebesar 25,79%.

Dua sektor lain yang merupakan sektor basis di Kabupaten Sukoharjo adalah sektor bangunan dan sektor jasa-jasa. Sektor bangunan menjadi basis ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, salah satunya disebabkan karena dikembangkannya kawasan perumahan Solo Baru dengan fasilitasnya memberikan andil yang cukup berarti dalam peningkatan sektor bangunan Kabupaten Sukoharjo. Di samping itu secara regional Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam kawasan pengembangan regional SUBOSUKA (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar). Wilayah Sukoharjo yang termasuk di dalam kawasan pengembangan SUBOSUKA adalah Kecamatan Sukoharjo, Kartosuro, Gatak, Grogol, Baki dan Nguter.

Berkaitan dengan pengembangan SUBOSUKA dan perkembangan fisik Kota Surakarta yang cenderung mengarah ke Selatan dan Barat maka beberapa kawasan di Kabupaten Sukoharjo akan mengalami perkembangan yang pesat karena harus menampung limpahan fungsi-fungsi perkotaan (*spill over*) yang tidak tertampung di Kota Surakarta. Kawasan-kawasan tersebut adalah Kartosuro, Grogol, Baki dan Mojolaban. Kondisi tersebut menjadi salah satu peluang bagi Kabupaten Sukoharjo karena investasi yang masuk ke Kabupaten Sukoharjo akan semakin besar.

Berdasarkan hal tersebut perumusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan sektor-sektor yang menjadi sektor andalannya adalah sektor-sektor basis tersebut. Hal ini berarti kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk lebih mengembangkan sektor-sektor basis ini adalah sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo .

Adanya pengembangan sektor-sektor basis diharapkan dapat terjadi arus pendapatan dari luar daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor ekonomi yang bersangkutan. Dimana peningkatan pendapatan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan investasi bagi sektor yang bersangkutan. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya meningkatkan permintaan atas sektor basis saja namun juga dapat meningkatkan permintaan pada sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor-sektor non basis.

Sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo yang termasuk sektor non basis adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan. Pengertian sektor non basis adalah sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo hanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal Sukoharjo, belum mampu memenuhi permintaan dari luar Sukoharjo. Misalnya sektor industri pengolahan baru mampu menyediakan output untuk kebutuhan masyarakat sebesar 88 persen sedangkan kekurangannya diimpor atau didatangkan dari daerah lain di luar Sukoharjo. Pengertian yang sama berlaku juga untuk sektor non basis lainnya di Kabupaten Sukoharjo.

Antara sektor basis dan sektor non basis merupakan sektor perekonomian yang saling menunjang, tidak bisa berdiri-diri. Dengan

adanya kemajuan di sektor basis nantinya akan bisa memberikan pengaruh ikutan bagi perkembangan sektor non basis, dan pada gilirannya sektor non basis bisa berubah perannya menjadi sektor basis di Kabupaten Sukoharjo.

2. Analisis Shift Share

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa pertumbuhan sektoral PDRB untuk Propinsi Jawa Tengah tahun 1998-2002 sebesar 15%. Nilai pertumbuhan proporsional (PP) yang mempunyai nilai positif terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini berarti sektor-sektor perekonomian itu mempunyai pertumbuhan yang termasuk cepat. Sedang untuk empat sektor lainnya yaitu sektor pertanian, sektor industri, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa mempunyai pertumbuhan yang termasuk lambat karena mempunyai nilai pertumbuhan proporsional yang negatif. Keseluruhan sektor-sektor perekonomian yang terdiri dari sembilan sektor tersebut di Kabupaten Sukoharjo mempunyai komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW) yang positif. Hal tersebut berarti sektor-sektor perekonomian itu mempunyai keunggulan daya saing wilayah pada sektor yang bersangkutan dibandingkan sektor yang sama pada wilayah lainnya.

Tabel 3 Hasil Analisis *Shift Share* Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo tahun 1998-2002

Sektor	▲Yij		PN		PP		PPW	
	Rp	%	Rp		Rp	%	Rp	%
Pertanian	273009,37	48,21	84946,985	15	-33104,56	-5.85	221167	93.06
Pertambangan & penggalian	13435,54	55.56	3627,4069	15	1775,7337	7.34	8032,4	33.22
Industri pengolahan	315718,64	55.60	85180,619	15	-4319,293	-0.76	234857	41.36
listrik, gas dan air bersih	26108,96	140.96	2778,6239	15	4318,7914	23.32	19011,5	102.64
Bangunan	75199,07	86.54	13035,759	15	5811,4225	6.69	56351,9	64.85
Perdagangan, hotel&restoran	240033,65	58.58	61471,995	15	18732,678	4.57	159829	39.00
pengangkutan & kom.	88957,96	97.48	13690,207	15	16002,613	17.54	59265,1	64.94
keu,sewa & jsa perush	52523,52	71.19	11067,578	15	-2608,58	-3.54	44064,5	59.73
jasa-jasa	104389,99	46.19	33903,701	15	-18966,88	-8.39	89453,2	39.58

Sumber : Diadopsi dan diolah dari data PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 1998-2002

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa pertumbuhan sektoral PDRB untuk propinsi Jawa Tengah tahun 1998-2002 sebesar 15%, namun pertumbuhan ini tidak sama/tidak merata untuk masing-masing sektor di wilayah Kabupaten Sukoharjo .

Pengaruh komponen Pertumbuhan Proporsional terbesar (yang mengalami pertumbuhan cepat) diterima oleh sektor listrik, gas dan air bersih yaitu selama periode 1998-2002 mengakibatkan adanya peningkatan PDRB secara keseluruhan sebesar 23,32%. Disusul sektor pengangkutan dan komunikasi yang meningkat sebesar 17,54%. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian (7,34%), sektor bangunan (6,69%) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 4,57%.Hal ini sesuai dengan kriterianya bahwa nilai PP_{ij} >0. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lambat adalah sektor

pertanian, sektor industri, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa

Komponen pertumbuhan proporsional menunjukkan pengaruh antar sektor ekonomi yang ada. Angka yang positif menunjukkan jika terjadi perubahan kebijakan di salah satu sektor maka sektor yang bernilai positif tersebut akan mengalami kenaikan. Dan sebaliknya, jika sektor tersebut bernilai negatif maka jika terjadi perubahan kebijakan di salah satu sektor maka sektor tersebut mengalami penurunan.

Sebagai contoh di Kabupaten Sukoharjo pada tahun analisis, jika terjadi perubahan kebijakan di sektor bangunan, maka akan berpengaruh positif terhadap sektor pertambangan dan penggalian sebagai bahan baku bangunan, meningkatkan konsumsi listrik, gas dan air bersih sebagai kebutuhan sehari-hari, arus perdagangan yang semakin komplek seiring dengan meningkatnya sarana pengangkutan dan komunikasi. Namun hal ini akan mengakibatkan menurunnya PDRB sektor pertanian sebesar -5,85% karena semakin berkurangnya lahan pertanian yang produktif akibat terjadinya alih fungsi lahan.

Sektor listrik, gas dan air bersih pertumbuhan PDRB-nya sebagian besar disumbang oleh komponen Pertumbuhan Proporsional yaitu sebesar 23,32% dan oleh komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah sebesar 102,64%. Sektor lain yang disumbang oleh Pertumbuhan Pangsa Wilayah adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 64,94%.

Berdasarkan nilai komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW_{ij}) semua sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo mempunyai keunggulan komparatif. Hal ini terlihat dari nilai PPW dari masing-masing sektor tersebut yang bernilai positif. Sektor industri mempunyai nilai PPW_{ij} yang terbesar yaitu Rp 234.857,31 juta yang berarti bahwa sektor industri pertumbuhan sektornya termasuk yang mempunyai keunggulan di Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan sektor yang sama di lain propinsi Jawa Tengah dalam hal PDRB.

Sektor industri pengolahan masih memegang peranan sangat penting di Kabupaten Sukoharjo dengan distribusi terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo terbesar (sebesar 26,34%). Sementara itu sektor perdagangan juga tetap menjadi andalan bagi Kabupaten Sukoharjo dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan tingkat partisipasi PDRB sebesar 24,89%. Tampaknya peranan yang sebelumnya diberikan oleh sektor pertanian dalam empat tahun terakhir ini diambil alih oleh sektor perdagangan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi sektor pertanian akibat kurang baiknya hasil panen pada beberapa komoditi pertanian. Dengan semakin sempitnya lahan pertanian dan menurunnya hasil panen serta makin maraknya kegiatan ekonomi masyarakat di sektor perdagangan maka akan mengakibatkan berubahnya struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Kecenderungan perubahan struktur ekonomi ini terlihat terutama setelah krisis ekonomi pada tahun 1998. Sektor perdagangan tampaknya menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat untuk mengatasi dampak krisis ekonomi (BPS, 2002).

Sektor perdagangan sebagai salah satu sektor andalan di Kabupaten Sukoharjo bertumpu pada komoditi pertanian dan industri. Selain itu letak Solo Baru, Grogol dan Kartasura sebagai koridor Kota Solo merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor ini.

Sektor listrik, gas dan air bersih mengalami peningkatan dan mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi. Hal ini didukung oleh kemajuan sektor perdagangan, industri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sektor ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih baik. Peningkatan sektor ini juga ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga konstan selama periode 1998 - 2002 yaitu sebesar 11,44%.

Sektor pertanian mempunyai distribusi terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo cukup besar yaitu 20,00% (setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran). Namun dalam laju pertumbuhannya menurut PDRB Kabupaten Sukoharjo, sektor pertanian mempunyai prosentase yang paling rendah dari sektor lainnya.

Sektor jasa memberikan sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo cukup besar yaitu 13,14% (setelah sektor industri,

pengolahan dan pertanian) dengan laju pertumbuhan sebesar 2,58%. Ini termasuk lebih rendah daripada sektor yang lain (prosentase rendah kedua setelah sektor pertanian).

Hasil perhitungan SSA, menunjukkan sektor pertanian, sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor dengan pertumbuhan yang lambat tetapi mempunyai keunggulan komparatif/daya saing. Pertumbuhan yang lambat dalam sektor pertanian disebabkan oleh adanya penurunan subsektor pertanian yaitu perkebunan dengan laju pertumbuhan sebesar 12,47%.

3. Analisis Gabungan *Location Quotient* dan *Shift Share*

Berdasarkan analisis struktur perekonomian di Kabupaten Sukoharjo melalui analisis LQ dan SSA diatas yang digabungkan maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat pada Tabel 4.

a. Berdasarkan Tabel 4. terlihat bahwa setelah dilakukan berbagai pendekatan analisis terhadap perekonomian Kabupaten Sukoharjo dengan metode *Location Quotient* dan analisis *Shift Share* maka hasil dari gabungan kedua analisis tersebut dapat memberikan usulan alternatif program pengembangan regional Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut: Pengembangan sektor prioritas pertama adalah sektor bangunan.
b. Pengembangan sektor prioritas kedua meliputi sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.
c. Pengembangan sektor prioritas ketiga adalah sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
d. Pengembangan sektor prioritas keempat, kelima dan alternatif tidak ada yang memenuhi. Pengembangan sektor prioritas pertama adalah sektor bangunan.
e. Pengembangan sektor prioritas kedua meliputi sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.
f. Pengembangan sektor prioritas ketiga adalah sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan.
g. Pengembangan sektor prioritas keempat, kelima dan alternatif tidak ada yang memenuhi.

Dari hasil analisis gabungan *Location Quotient* dan *Shift Share* dapat diketahui bahwa sektor bangunan menjadi prioritas pertama dalam pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo. Sektor bangunan meskipun sumbangannya terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo hanya berkisar 4,24% pada tahun 2002, namun laju pertumbuhannya cukup tinggi yaitu 120,51%. Dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor ini mengalami peningkatan yang cukup besar. Sektor bangunan mempunyai keunggulan komparatif. Hal ini berkaitan dengan arah pembangunan Kabupaten Sukoharjo dalam memajukan bidang industri dan pemukiman penduduk. Keberadaan pemukiman elit Solo Baru merupakan potensi yang dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo mengarahkan kebijaksanaannya melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ada sehingga diharapkan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya kebijaksanaan tersebut, terdapat sektor yang mengalami peningkatan seperti sektor bangunan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 4. Gabungan LQ dan SSA sektor perekonomian Kabupaten Sukoharjo Tahun 1998-2002

Sektor perekonomian	analisis LQ	Analisis shift share		sektor prioritas
		PP	PPW	
Pertanian	B	-	+	II
Pertambangan&penggalian	NB	+	+	II

Industri pengolahan	NB	-	+	III
Listrik, gas dan air bersih	NB	+	+	II
Bangunan	B	+	+	I
Perdagangan, hotel&restoran	NB	+	+	II
Pengangkutan&komunikasi	NB	+	+	II
Keuangan,sewa & jasa perush	NB	-	+	III
Jasa-jasa	B	-	+	II

Sumber : Analisis dari PDRB Kabupaten Sukoharjo tahun 1998-2002

Sektor pertanian ditempatkan sebagai prioritas kedua setelah sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor ini memberikan sumbangan sebesar 20% dari total PDRB 2002. Sektor pertanian tahun 2002 mengalami perkembangan positif seperti halnya pada tahun 2001. yaitu sebesar 0,14%. Positifnya perkembangan sektor pertanian pada tahun 2002 ini disebabkan naiknya produksi panen beberapa komoditi pertanian, yang tergabung dalam sub sektor tanaman (0,61%), bahan makanan (2,96), peternakan (11,19%), perikanan dan kehutanan (2,70%). Dalam Properda Sukoharjo tahun 2001-2005, sektor pertanian merupakan sektor yang diprioritaskan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melihat dari sudut pandang jumlah penduduk yang terlibat, kontribusi yang diberikan, serta luas lahan yang dibutuhkan.

Laju pertumbuhan yang peningkatannya paling besar dialami oleh sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 11,44%. Seperti tahun sebelumnya sektor listrik masih mengalami peningkatan yang terbesar, hal ini akibat dari masih banyaknya proyek-proyek pembangunan perumahan di beberapa lokasi perumahan guna memenuhi banyaknya permintaan konsumen akan kebutuhan perumahan setelah berlalunya krisis ekonomi. Dengan adanya perumahan baru tersebut secara otomatis akan meningkatkan permintaan kebutuhan listrik dan air bersih.

Sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan menempati urutan ketiga di Kabupaten Sukoharjo. Sektor industri mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 4,73%. Peningkatan ini lebih besar apabila dibandingkan dengan peningkatan tahun sebelumnya yang tercatat 3,42%. Laju pertumbuhan tersebut diakibatkan pada peningkatan produksi beberapa industri pengolahan yang meliputi industri kecil dan rumah tangga yang mendapatkan pesanan kembali setelah mengalami krisis yang berkepanjangan.

Dari hasil gabungan analisis *Location Quotient* dan *Shift Share* menunjukkan struktur perekonomian di Kabupaten Sukoharjo cenderung menitikberatkan pada sektor sekunder dan tersier, yaitu sektor bangunan sebagai prioritas utama serta sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa sebagai prioritas kedua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis gabungan *Location Quotient* dan analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa sektor prioritas pertama adalah sektor bangunan dan konstruksi, prioritas ke dua adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa. Sedang sektor industri pengolahan dan sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan menempati prioritas ke tiga.

Dari hasil tersebut saran yang diberikan adalah (1) Sektor bangunan sebagai sektor prioritas pertama perlu dipertahankan sesuai dengan arah perkembangnya wilayah regional sehingga mampu mengambil manfaat dari perkembangan wilayah tersebut, Namun demikian perlu dipertimbangkan dalam pemanfaatan lahan sehingga tidak mengganggu sektor lain seperti sektor pertanian. (2) Sektor pertanian

sebagai sektor prioritas ke dua perlu didukung perkembangannya dalam kerangka menciptakan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan produk pangan lokal dan mengurangi ketergantungannya dari daerah lain, selain masih merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk, (3) Kebutuhan akan energi listrik, gas dan air yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan analisis kemampuan daya dukung dan pembiayaannya baik oleh pemerintah dan masyarakat. (4) Dalam pemilihan pengembangan sektor perekonomian disamping memperhatikan skala prioritas juga perlu diperhatikan sumbangan/ distribusi sektor perekonomian bersangkutan terhadap PDRB kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 1999. *UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999.* Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Jakarta.

Akhabani. 1992. *Industrialisasi di Indonesia,* seperti dikutip Widodo, S.T. 1997. Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi. Kanisius. Yogyakarta.

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* BPFE UGM. Yogyakarta.

APPEDA. 2001. *Profil dan Peluang Investasi Kabupaten Sukoharjo.* BAPPEDA. Sukoharjo.

----------. 2001. *Rencana Strategis Tahun 2001-2005 Kabupaten Sukoharjo.* BAPPEDA. Sukoharjo.

BPS. 2002. *PDRB Kabupaten Sukoharjo 2002.* BPS. Sukoharjo.

_____, 2002. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka. BPS. Sukoharjo

_____,1997-2001. Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka. BPS. Sukoharjo

Budiharsono, S. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan.* Pradnya Paramita. Jakarta.

Glasson. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional.* LPFE UI. Jakarta.

Hadis, S. 1996. *Ekonomi Internasional.* Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Ichimura, S., 1989. *Pembangunan Ekonomi Indonesia : Masalah dan Analisis.* UI – Press. Jakarta.

Rachmat, Muchjidin. 1995. *Struktur dan Kinerja Agroindustri di Indonesia, dalam Erwidodo (Edt) Prosiding Agribisnis : Peluang dan Tantangan Agribisnis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.* Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

Raharjo, D.M. 1986. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja.* UI Press. Jakarta.

Richardson, H. W. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional,* seperti dikutip Suyatno. 2000. Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri: Menghadapi Implemtasi UU No. 22/1999 dan UU No. 5/1999. Jurnal Ekonomi Pembangunan 1 (2) : 144-159.

Ropingi. 2002. *Analisis Komponen Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Propinsi Jawa Tengah (Pendekatan Model E-M Shift Share Analysis).* Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Volume 3 No.1 Juni 2002. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

Sartono. 2002. *Analisis Penentuan Prioritas Program Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2001 (Penerapan Model Analytic Hierarchy Process).* Skripsi S1 Mahasiswa FE Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (Tidak dipublikasikan).

Setyani, Sumardi, dan Supriyanto. 2002. *Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan Regional, Potensi Wilayah dan Perubahan Sektor Ekonomi Kabupaten Klaten*. Makalah FE UNS. Surakarta.

Sumodiningrat, G. 1996. *Perencanaan Pembangunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Prisma Nomor Khusus 25 tahun Prisma. LP3ES. Jakarta.

Susanti. H. Moch. Ikhsan dan Widyanti. 1995. *Indikator-indikator Makroekonomi*. Lembaga Penerbit FE UI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI. Jakarta.

Suyatno. 2000. *Analisis Ekonomi Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah tingkat II Wonogiri : Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan 1 (2) : 144-159. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta

Todaro, MP. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1. Edisi Keempat. Terjemahaan. Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Widiastuti, Nur. 1999. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Regional Propinsi Jawa Tengah*. Skripsi S1 Mahasiswa FE Universitas Sebelas Maret. Surakarta. (Tidak dipublikasikan).

Widodo, S T. 1990. *Indikator Ekonomi. Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Penerbit Kanisius. Jakarta.

Widodo, S.T. 1997. *Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi*. Kanisius. Yogyakarta.

Winoto, J. 1996. *Transformasi Struktur Perekonomian dan Ketenagakerjaan Nasional (Tinjauan Teoritis dan Aplikasinya terhadap Transformasi Perekonomian dan Ketenagakerjaan Nasional yang Telah Terjadi dan Proyeksinya Sampai dengan Akhir PJP II)*. Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. Program Pascasarjana IPB. Bogor.